



Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bligo Village, Candi District, Sidoarjo Regency

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Retno Agustin Ningrum*, Isnaini Rodiyah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bligo Village, Candi District, Sidoarjo Regency and to determine the supporting factors and inhibiting factors for the implementation of the Expected Family Program. This study uses a qualitative descriptive research method with the technique of determining the informant using purposive sampling. The location of this research is in Bligo Village, Candi District, Sidoarjo Regency. Data collection techniques obtained by means of observation, documentation and interviews. The collection technique consists of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The method used for research is the method according to Edward III and has 4 factors consisting of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of the Family Hope Program in Bligo Village, Candi District, Sidoarjo Regency in terms of communication is still not optimal, in terms of resources, it is in accordance with the job disk and the facilities provided are appropriate, in terms of disposition, implementation is in accordance with regulations and has commitment. and in terms of bureaucratic structure has been implemented. Constraints faced from data inhibiting factors which are still top-down and supporting factors for very high public enthusiasm.

Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program, Edward III

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Hendra Sukmana

Reviewed by:

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni and
Bambang Kusbandrijo

**Correspondence:*

Retno Agustin Ningrum
Retnoningrum@umsida.ac.id

Published: 29 Maret 2019

Citation:

Ningrum & Rodiyah (2019)
Implementation of the Family
Hope Program (PKH) in Bligo
Village, Candi District, Sidoarjo
Regency.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik). 7:1.

doi: 10.21070/jkmp.v7i1.1691

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal untuk mensejahterakan penduduk dengan cara mengurangi angka penduduk miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menangani dan mengurangi penduduk kemiskinan dilakukan dengan mengeluarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dari kondisi miskin sebagai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi untuk pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga negara yang mengalami kemiskinan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial, Program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bermasyarakat kepada penduduk miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima

manfaat Program Keluarga Harapan(PKH). Program Keluarga harapan(PKH) ini juga dikenal di dunia untuk menanggulangi kemiskinan yang kronis diberbagai negara yang dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT) (Sosial, 2012). Program ini bergerak pada pemberian bantuan berupa dana kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Indonesia sendiri telah menggunakan program ini untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia, sejak tahun 2007.

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi sehingga penduduk yang sangat miskin dapat hidup lebih baik lagi dan sejahtera. Sebagai program bantuan bersyarat, program keluarga harapan PKH membuka akses bagi keluarga miskin untuk ibu hamil, dan anak untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dan fasilitas pendidikan (fasdik). Program Keluarga Harapan PKH juga mencakup masyarakat disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan(PKH) diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional, oleh karena itu dari Program Keluarga Harapan(PKH) yang sudah dijalankan di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Jawa Timur.Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun nya, hal membuat Kabupaten Sidoarjo menerapkan dan menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) (Sosial, 2016).

Tabel 1.
Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah PKH
2015	2.117.279	371.947	8.952
2016	2.150.482	394.401	9.913
2017	2.214.377	414.479	23.490
2018	2.219.581	437.899	41.630
2019	2.262.440	462.738	37.537

bahwa jumlah penduduk Kabuapten Sidoarjo mengalami kenaikan sementara jumlah penerima program keluarga harapan(PKH) dari tahun ke tahun tidak sebesar jumlah penduduk miskin yang ada, meski demikian adanya program keluarga harapan(PKH) diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan. Namun dari tahun 2015-2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang signifikan. Tetapi kecenderungan jumlah penerima program keluarga harapan(PKH) semakin menurun di tahun 2018-2020.

Untuk memaksimalkan Program Keluarga Harapan pemerintah Kabupaten Sidoarjo membantu meringankan beban ekonomi penduduk miskin dan mengupayakan menurunkan angka penduduk miskin dengan cara pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan menyalurkan program keluarga harapan(PKH) dengan cara Desa melakukan pendataan bagi penduduk yang sangat miskin melalui aplikasi SIKS-NG(Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) di tingkat desa dan pemerintah daerah langsung menerima data dari aplikasi SIKS-NG yang sudah dikelola oleh desa kemudian dari data SIKS-NG tersebut pemerintah daerah mengkonfirmasi.

Dari pendataan tersebut keluar daftar penerima program keluarga harapan(PKH) tingkat kecamatan namun melalui proses sistem SIK-NG ternyata belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan, bahwa terdapat ketidak sesuaian antara jumlah warga miskin dan penerima program keluarga harapan(PKH). desa Bligo telah menerima program keluarga harapan (PKH) dari tahun 2014 sampai saat ini dan menurut SIKS-NG sistem informasi kesejahteraan nex generation desa Bligo menilai jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit dan total penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Bligo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Penduduk Miskin dan Penerima Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Bligo Tahun 2019

Kategori	Jumlah
Penduduk Miskin	207
Penerima PKH	56

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan jumlah penerimabantuan program keluarga harapan diketahui selisih 151 penduduk miskin yang belum menerima bantuan PKH. Sehingga dapat diketahui bahwa warga miskin di Desa Bligo masih ada yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam penyaluran program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bligo masih dikatakan belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini dilihat dari tabel diatas terjadinya tidak tepatan sasaran sehingga memunculkan presentase yaitu 20% meskipun selisih presentase hanya sedikit namu masih menyisahkan jumlah penduduk Miskin yang tidak sedikit yang sudah dijelaskan pada paragraf pertaman. dari jumlah penduduk miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta data penduduk miskin yang belum diperbarui oleh Aparatur Desa yang seharusnya perlu update karena kondisi ekonomi masyarakat desa dapat berubah setiap waktu.

Permasalahan lain juga dapat ditemukan di program keluarga harapan(PKH) di Desa Bligo seperti kurangnya sosialisasi antar pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) dan Aparatur Desa Bligo dengan penduduk miskin yang menerima program keluarga harapan(PKH). hal ini yang menyebabkan masyarkat miskin yang menrima program Keluarga harapan(PKH) Desa Bligo belum memahami tujuan dan manfaat dari Program Keluarga Harapan(PKH), serta Penerima program keluarga harapan(PKH) masih terdapat penyalagunaan bantuan untuk kepentingan di luar kebutuhan, pendidikan dan kesehatan. Serta tidak adanya penanda bahwa masyarakat tersebut telah menerima bantuan program keluarga harapan(PKH). Hal ini yan menjadikan suatu hal yang sangat menarik untuk melakukan kajian sesuai dengan judul, hal ini berguna untuk mendapatkan hasil tentang bagaimana program keluarga harapan(PKH) dapat diterapkan, dilaksanakan dan dirasakan langsung oleh penduduk yang menerima program keluarga harapan(PKH) di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian riset yang sifatnya deskripsi serta cenderung menerapkan analisis dan lebih menempatkan pada proses makna dari penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian kualitatif ini cocok untuk penelitian bila terdapat permasalahan yang belum jelas, masih abu-abu. Dan kondisi seperti ini cocok digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini akan masuk pada objek dan melakukan sebuah penjelajahan sehingga dapat menemukan sebuah kejelasan topik penelitian. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi Teknik penganalisisan data model interaktif Miles dan Huberman (2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu variabel penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan publik atau suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan kepentingan bersama. Berikut hasil yang didapatkan:

Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi atau sekelompok untuk saling memberikan sebuah informasi. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan perlu adanya sebuah komunikasi untuk memberikan sebuah informasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Proses komunikasi memiliki peran khusus terhadap keberhasilan kebijakan. Proses komunikasi yang baik antara stakeholder mampu memberikan penyaluran apa yang sedang direncanakan dan yang akan dikerjakan dalam pembuatan maupun proses pelaksanaan kebijakan dengan arahan pimpinan kepada staf maupun dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses implementasi kebijakan.

Dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara Pemerintah dan pendamping PKH desa Bligo telah melakukan komunikasi dengan cara memberikan sosialisasi terkait program keluarga harapan PKH, kegiatan sosialisasi ini yang dilakukan pemerintah dan pendamping yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai program keluarga harapan PKH dan proses mekanisme penyaluran dana bantuan serta sebagai pendekatan antara pendamping dan penerima PKH. Kejelasan informasi juga sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan. Kejelasan diperlukan dalam prosedur pendataan, penyaluran dan pendampingan program keluarga harapan PKH harus jelas jika ada yang tidak jelas dan membingungkan maka akan berpengaruh terhadap tujuan dari program keluarga harapan PKH. dalam hal ini salah satu kejelasan yang terus dilakukan dilakukan oleh pemerintah yaitu konsisten dalam menyalurkan dana bantuan per 3 bulan sekali.

Dalam pelaksanaan ini masih belum bisa dikatakan kurang efektif karena masih terdapat masyarakat yang belum paham benar mengenai program PKH. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pendamping dalam menginformasikan program keluarga harapan PKH kurang optimal sehingga masih ada masyarakat yang masih belum paham mengenai mekanisme pendataan, penerimaan dan tujuan dari PKH.

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah yang pertama memiliki staff yang dikatakan cukup jumlahnya serta mempunyai keahlian, keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. Dan yang kedua informasi yang dimaksud dalam sumber daya ini adalah sebuah informasi yang dapat memadai untuk keperluan implementasi. Yang ketiga ada kewenangan dalam implementasi kebijakan kewenangan sangat dibutuhkan untuk memiliki implementor dalam melaksanakan kebijakan. Dan yang terakhir fasilitas yang dimaksud dari fasilitas dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pelaksana kebijakan yang mempunyai tugas utama untuk mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat.

Sumber daya sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan program keluarga harapan PKH. Dalam proses pendampingan PKH di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat staf/pendamping untuk ditugaskan sebagai pendamping PKH di desa. Terdapat 1 staf/pendamping untuk mendampingi Penduduk yang menerima PKH di Desa Bligo. Tugas dari pendamping adalah untuk memberikan informasi terkait PKH dan memiliki wewenang untuk mendampingi. Tidak hanya itu fasilitas dan anggaran juga sangat penting dalam mensukseskan tujuan program PKH. Dalam pelaksanaan sumber daya informasi yang dilakukan oleh para pelaksana belum optimal. Sedangkan dalam fasilitas masih minim hanya fasilitas kesehatan dari desa yang sering digunakan oleh masyarakat.

Disposisi

. Disposisi merupakan faktor pertimbangan mengimplementasikan kebijakan Disposisi juga sangat penting dalam pendekatan studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan publik berlangsung diharapkan akan berjalan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melakukan

kebijakan. Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor disposisi merupakan alasan terpenting dalam melaksanakan implementasi kebijakan karena merupakan sikap dari pelaksanaan atau sikap dari stakeholder.

Disposisi merupakan keinginan dan kemauan serta semangat dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang ada dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Komitmen yang ditunjukkan bukan hanya dari pemerintah dan pendamping saja akan tetapi komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh pihak Desa dimana mereka memiliki komitmen kuat untuk menjalankan kebijakan program keluarga harapan. sikap dan komitmen pelaksana terhadap program jika bersinergi maka akan dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan PKH. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap dan insentif. Para pegawai yang berkaitan langsung dengan kegiatan PKH, baik koordinator maupun pendamping harus siap terhadap kendala- kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang penerima bantuan PKH. wujud komitmen yang harus dilakukan pendamping PKH Desa Bligo saat menangani kendala.

Selalu memberikan pendampingan jika terjadi permasalahan saat proses pencairan dana. pendapatan insentif ini diberikan untuk menunjang kegiatan pendampingan selama Pandemi Covid-19, dikarena saat ini tidak bisa melakukan perkumpulan oleh sebab itu di ganti dengan pendampingan secara online. diharapkan dengan adanya pendapatan insentif dapat memaksimalkan pendampingan secara online.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan bagian terpenting yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan dalam implementasi kebijakan. Bahwa terdapat dua karakteristik dalam utama dari birokrasi yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. yang pertama dari aspek mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini menjadikan sebuah pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Seperti pada Implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Desa Bligo memiliki SOP atau standard Operating Prosedur dalam pelaksanaannya yang tentunya sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat atau Kementerian Sosial. untuk menentukan kriteria penduduk yang berhak menerima PKH, dikarenakan PKH merupakan program bantuan bersyarat yang bisa dikatakan program ini hanya diperuntuk untuk keluarga yang sangat miskin. Dalam Pelaksanaan PKH perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab diantara unit kerja. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dari pemerintah pusat sampai yang terendah yaitu penerima PKH. Akan tetapi terdapat permasalahan pada tugas dan fungsi yang tidak dipahami sampai pada level terendah. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur dimana dalam hal ini guna memudahkan dan menyelaraskan tindakan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Dapat ditarik pemahaman bahwa teori Menurut Edwards III jika dikaitkan dengan fenomena yang ada di lapangan sudah sesuai dalam SOP yang ditetapkan dan dimana dalam penyebaran wewenang dari struktur birokrasi telah dilakukan secara baik oleh masing-masing pelaksana kebijakan dengan batasan wewenang yang sudah ditentukan secara umum. Program keluarga harapan PKH adalah program yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan yang ada di Desa Bligo terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program keluarga harapan PKH.

KESIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari segi sumber daya manusia menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas telah disesuaikan dengan jumlah petugas yang dalam pendampingan program keluarga harapan PKH pada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pedoman Umum PKH yaitu dalam satu desa terdapat 1 satu petugas yang mendampingi penerima PKH. Program Keluarga Harapan PKH di Desa Bligo dapat di informasikan bantuan PKH turun per 3 bulan sekali. wewenang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari pedoman umum PKH. fasilitas pada saat di lokasi penyelenggara pelayanan fasilitas yang ada menunjukkan bahwa terdapat fasilitas kartu PKH, jaminan Kesehatan dan pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat PKH. untuk fasilitas kesehatan terdapat kendala seperti untuk berobat kerumah sakit dibutuhkan prosedur yang cukup ruit dilakuakn hal ini yang membuat kendala proses yang berbelit-belit. Komitmen dari pemerintah sudah cukup dimana untuk pendamping dan pemerintah Desa berkomitmen dalam menjalankan program keluarga harapan di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Pedoman Umum PKH. Sehingga bertujuan untuk saling bersinergi satu sama lain demi mencapai tujuan suatu program komitmen yang kuat tersebut dibarengi dengan Insentif yang cukup yang diberikan oleh pemerintah untuk pendamping untuk kepentingan pendampingan di masa-masa sulit seperti Covid-19. Akan tetapi terdapat kendala seperti tidak adanya pengecekan rumah dan penandaan bahwa rumah tersebut sudah penerima PKH. SOP dalam pelaksanaan program keluarga harapan PKH telah diterapkan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Pendamping PKH Desa Bligo yang telah menerapkan Kreteria Penerima Manfaat PKH.

PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik

REFERENCES

- Kemensos. (2009, April 21). Undang-undang Nomer 11 Tentang Kesejahteraan sosial. Diambil kembali dari Undang-Undang Nomer 11 Tentang KesejahteraanSosial:[online]
- Rohman, A., & Novitawati, R. A. (2020). Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *jurnal ilmu manajemen dan akuntansi* vol.8, No.2,2020, 9-22 [online]
- Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional. (2004, Januari 4). Diambil kembali dari UU No.40 Tahun 2004 tentangSistemKesejahteraanSosialNasion [online]
- Sosial, D. J. (2012). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). Indonesia: Kementerian Sosial RI [online]
- Sosial, D. j. (2016). Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial. [online]
- SIKS-NG. (2020-2021, Februari). Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation. Diambil kembali dari Siks-Dataku data terpadu kesejahteraanansosial[online]
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Bandung
- Anggara, S. (2016). Ilmu Adminitrasi Negara, Kajian Konsep, Teori, Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: CV Pustaka Setia, Jl. BKR (Lingkar Selatan) No.162-164
- Sosial, D. J. (2012). Pedoman Operasional PKH Bagi Pelayanan Kesehatan. Indoesia: Kementerian Sosial RI [Online]
- Sosial, D. j. (2010). Buku Saku Pendamping PKH. Indonesia: Kementerian Sosial RI[Online]
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Malang: Intrans Publishing

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2019 Retno Agustin Ningrum, Isnaini Rodiyah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.